# *NOKEN* DEMOKRASI: SISTEM, NEGOSIASI, DAN TRANSFORMASI KEINDONESIAAN DI PAPUA!

Hugo Warami Universitas Negeri Papua – Manokwari surel: warami\_hg@yahoo.com

#### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengungkap sebagaian dari proses demokrasi, yakni noken dipandang sebagai sebuah konstruksi kontekstual yang terkini dalam membangun prinsip-prinsip kesetaraan dan keberpihakan yang sesuai dengan citacita demokrasi. Noken secara kreatif, inisiatif, dan imajinatif menjadi alat legitimasi baru rakyat Papua dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai sistem media demokrasi (noken demokrasi), noken juga dikonstuksikan sebagai media perdamaian dalam proses aktor yang berkonflik (noken dialog).

Eksplorasi *Noken* Demokrasi Papua melalui paradigma kritis sebagai bentuk ungkapan pembebasan, emansipatoris, dan pencerahan serta dianalisis melalui perspektif *Critical Discourse Analysis* (CDA). Eksplorasi *noken* demokrasi ini diharapkan untuk melakukan konstruksi refleksif terhadap ruang pengalaman demokrasi rakyat Papua yang tumbuh dan berkembang dalam kerangka Negara Kesatua Republik Indonesia.

Tulisan ini memfokuskan pada upaya pengungkapan "Noken Demokrasi: Sistem, Negosiasi, dan Transformasi Keindonesiaan di Papua". Untuk sajian analisisnya, fakta budaya dan politik demokrasi yang menjadi bagian dari tradisi dapat dikonstruksikan atas tiga bagian, yakni (1) Sistem Noken Demokrasi, (2) Negosiasi Noken Demokrasi, dan (3) Transformasi Keindonesiaan dalam Format Papua.

Kata Kunci: Noken Demokrasi, Sistem, Negosiasi, dan Transformasi Ke-Indonesiaan

### 1. Pendahuluan

Dewasa ini demokrasi dianggap sebagai pengorganisasian kehidupan bersama yang layak mencerminkan kehendak umum karena merujuk pada wujud partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Sebuah harapan yang ideal tertuju pada demokrasi yang dianggap oleh sebagian orang akan melindungi kebebasan warga negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisan ini akan mencoba mengurai tradisi noken dan model demokrasi yang dapat diacu menjadi sebuah sistem yang digunakan dalam tatanan demokrasi Indonesia. Menurut Haryatmoko (2014:200) menyebut bahwa demokrasi yang telah dialami dan disaksikan tidak serta-merta menghasilkan apa saja yang diharapkan. Ironisnya, demokrasi lahir melalui konflik yang berkepanjangan:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tulisan ini merupakan bagian dari kerangka pemikiran Materi dalam Seminar Tradisi Lisan Internasional, ATL Pusat-ATL Cabang Manado, 21-24 September 2014

kerusuhan terjadi di mana-mana, pertumbuhan ekonomi yang tidak menampakkan perubahan, bahkan pengangguran semakin merajalela, tiadanya rasa aman karena kriminalitas semakin meluas dan dan nekat, korupsi tidak juga mereda, angka kemiskinan semakin tinggi. Sedangkan *noken* merupakan sebuah tradisi lisan dan bagian dari gerbang masuk untuk memahami dinamika etnisitas rakyat Papua yang diyakininya sebagai cermin identitas dan transformasi keindonesiaan. *Noken* mengadung fungsi dan peran tradisi sebagai salah satu kekayaan budaya tak benda *'Intangiable Cultural Heritage'* (*ICH*) yang terbukti merupakan kekuatan kultural membangun peradaban rakyat Papua yang telah diakui keberadaanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan gambaran fenomena demokrasi dan tradisi *noken* di atas, maka tulisan ini berupaya mengeksplorasi formasi demokrasi dan tradisi *noken* di Papua dengan berbagai wujudnya sebagai salah satu sumber pembentukan identitas dan pengikat karakter bangsa Indonesia dalam berbagai sendi kehidupan. Eksplorasi *noken* demokrasi ini diharapkan untuk melakukan konstruksi refleksif terhadap ruang pengalaman demokrasi rakyat Papua yang tumbuh dan berkembang dalam kerangka Negara Kesatua Republik Indonesia. Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini memfokuskan pada upaya pengungkapan "*Noken* Demokrasi: Sistem, Negosiasi, dan Transformasi Keindonesiaan di Papua". Untuk sajian analisisnya, fakta budaya dan politik demokrasi yang menjadi bagian dari tradisi dapat dikonstruksikan atas tiga bagian, yakni (1) Sistem *Noken* Demokrasi, (2) Negosiasi *Noken* Demokrasi, dan (3) Transformasi Keindonesiaan dalam Format Papua.

### 2. Sistem Noken Demokrasi

Noken dalam perspektif bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, kantong atau tas tetap menjadi kantong atau tas, noken tetap menjadi noken bagi rakyat Papua. Tradisi noken dalam kehidupan rakyat Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rentang waktu yang cukup panjang serta lama. Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua. Tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna-makna filosofis demokrasi (lihat Ell, dkk., 2013: 19-21 dan Pekei, 2011: 64) sebagai berikut: (1) sebagai simbol relasi, (2) sebagai simbol kekeluargaan, (3) sebagai simbol identitas, (4) sebagai simbol perlindungan, (5) sebagai simbol ekonomi, (6) sebagai simbol kehidupan, (7) sebagai simbol estetika, dan (8) sebagai simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Warami (2014:1) Legitimasi keberadaan tradisi noken telah dilakukan oleh UNESCO sebagai lembaga resmi PBB sebagai bagian dari ICH yang harus dilindungi dan dikembangkan sesuai amanat konvensi 2003, yakni Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage serta penguatan landasan hukum oleh Pemerintah Indonesia yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78, Juli 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Secara etimologi, kata noken belum jelas asal usul proto bahasanya pada keragaman bahasa yang ada di Tanah Papua. Namun, jika ditelusuri leksikon katanya dalam bahasa daerah, secara genetis termasuk dalam kerabat keluarga bahasa West Papua New Guinea, subgroup rumpun bahasa Austronesia, yakni Austronesian-Melayu Polinesian-Central Eastern-Eastern Melayu-Polinesian-South Halmahera-West New Guinea-West New Guinea-Cenderawasih Bay-Biak (bahasa Biak), yakni inoken 'tas anyaman atau tas keranjang khas Papua'.

Fakta hari ini mengungkap bahwa telah terjadi paradoks mekanisme politik dalam proses demokrasi tidak seefektif dan representatif seperti yang dijanjikan karena akhirnya hanya beberapa orang saja yang menjalankan kekuasaan itu. Dalam keseharian hidup, masyarakat selalu dalam posisis di bawah belas kasihan negara dan pasar. Negara sebagai pemegang kekuasaan, terdiri atas lembaga-lembaga yang tersentralisasi. Negara mengendalikan sumber-sumber serta kesetiaan baik dengan paksa maupun secara persuasif. Akhirnya hanya segelintir orang yang memiliki akses kelembaga-lembaga tersebut (bdk. Haryatmoko (2014:200).

Dalam prinsip *noken* demokrasi, diharapkan sistem dan struktur politik dapat mengadopsi hal-hal konkrit nilai kelokalan Papua yang termanifestasi dan terintegrasi dalam bentuk norma-norma dengan prinsip demokrasi, yakni semangat pelayanan, pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan yang efektif, desentralisasi, serta adanya konsistensi dan kepastian hukum.

## 3. Negosiasi *Noken* Demokrasi

Dalam perspektif negosiasi, pemerintah tampaknya tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu bahwa penggunaaan cara-cara represif tidak dapat menyelesaikan konflik. Bahkan, berbagai pendeketan yang ditawarkan sebaliknya melanggengkan konflik dan hanya menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah semestinya belajar dari pengalaman penanganan konflik di beberapa daerah di Indonesia yang pernah berdamai. Misalnya penanganan konflik Aceh melalui jalan dialog setelah mengalami konflik selama puluhan tahun. Untuk itu, yang menjadi hal penting dan menjadi suatu keharusan untuk memutus siklus konflik dan kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun di Papua adalah melalui format "noken" negosiasi damai atau noken dialog. Merujuk pada perkembangan terakhir, dan harapan untuk menyelesaikan Papua melalui jalan damai saat ini terbuka setelah Presiden menyetujui dijalankannya dialog Jakarta-Papua dalam menyelesaikan persoalan Papua. Selain itu, format "noken" negosiasi damai atau noken dialog dapat merumuskan bagaimana sistem dan mekanismenya sebagai kerangka acuan bagi Jakarta dan Papua, sehingga komitmen dialog damai dapat diwujudkan.

Sejalan dengan filosofis *noken* sebagai cermin identitas dan media negosiasi damai, maka tradisi *noken* menjelma menjadi alat legitimasi baru dalam proses demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Noken* sebagai media negosiasi damai kini mencuat ke permukaan persada Nusantara sebagai alat legitimasi baru dalam meminimalisir konflik-konflik kekerasan dan konflik komunal di Tanah Papua. Saat ini rakyat Papua menghendaki agar konflik Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai yang dikemas dengan nama "*Noken* Dialog'.<sup>5</sup> *Noken* dialog yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cerita sukses di Aceh ini sudah seharusnya menjadi referensi penting bagi pemerintah bahwa penanganan Papua juga bisa dijalankan melalui pendekatan dialog.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tetapi hingga kini, orang Papua belum memiliki konsep dialog yang mereka ingingkan. Alasannya, karena orang Papua terdiri dari banyak suku dan kelompok/faksi perlawanan. Maka yang disharingkan dalam tulisan ini hanyalah sebuah pandangan pribadi tentang dialog yang direfleksikan di Tanah Papua.

akan dilaksanakan antara Jakarta-Papua<sup>6</sup> sangat diharapkan dengan beberapa pertimbangan dasar,<sup>7</sup> yakni: (1) Jalan kekerasan tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik Papua, (2) Penerapan Hukum Pidana, dengan menangkap dan memenjarakan semua orang Papua, tidak menyelesaikan Masalah Papua, (3) Implementasi UU No 21 Tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua hingga kini belum meningkatkan taraf kesejahterahan orang Papua, (4) Pemerintah tidak memperlihatkan komitmennya untuk melaksanakan UU Otsus Papua secara konsisten, selain penguncuran dana tanpa adanya dasar hukum tetang bagaimana dana tersebut digunakan. Pemerintah juga tidak mempunyai komitmen untuk melakukan evaluasi implemetasi UU Otsus dengan melibatkan rakyat Papua yang adalah sasaran dari implementasi UU Otsus ini, (5) Orang Papua semakin tidak percaya pada Pemerintah: "Tulis lain, bicara lain, buat lain", dan (6) Papua dapat menjadi sorotan internasional (bdk. Tebay, 2011).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka format "noken" negosiasi damai yang diperuntukan bagi Jakarta-Papua memiliki acuan yang jelas dalam mengakomodir, kekwatiran, kepentingan, dan harapan dari kedua belah pihak yang ingin berdialog dan mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, prinsip-prinsip dasar. Prinsip ini harus mengacu pada (a) konflik Papua yang diselesaikan secara damai, bukan kekerasan, (b) konflik Papua diselesaikan secara menyeluruh, bukan parsial, (c) konflik Papua diselesaikan secara bermartabat, maka tidak boleh ada pihak yang merasa kehilangan muka, dan (d) resolusinya harus ada tindak lanjut setelah mencapai kesepakatan. Kedua, tujuan dialog. Tujuan dilakukannya Noken Dialog adalah menciptakan Perdamaian di Papua (Papua Tanah Damai). Ketiga, target dialog. Targettarget dapat dicapai secara langsung pada akhir dialog antara Jakarta dan Papua adalah teridentifikasinya indikator-indikator dari Papua Tanah Damai, yakni (a) masalahmasalah mendasar yang mesti dituntaskan, (b) apa pemicu konflik tersebut, (c) solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, (d) kebijakan-kebijakan strategis yang mencegah terulang kembalinya masalah-masalah tersebut di masa depan, (e) peranan dan sumbangan dari para pemangku kepentingan untuk menciptakan perdamaian, dan (d) tindak-lanjut dan aksi yang dilaksanakan setelah kesepakatan. Keempat, partisipasi pemangku kepentingan. Peserta partisipasi noken dialog terdiri atas sembilan kelompok aktor perlu dilibatkan dalam proses persiapan dialog Jakarta-Papua, yakni: (a) orang asli Papua, (b) Penduduk Papua (terutama warga non-Papua yang jumlahnya mencapai 48 persen dari penduduk di Papua dan Papua Barat), (c) Polri, (d) TNI, (e) pemerintah daerah (provinsi, Kabupaten, dan kota), (f) perusahaan-perusahaan asing dan domestik yang mengeksploitasi kekayaan alam di Tanah Papua, (g) pemerintah pusat, (h) Gerilyawan Papua yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional (TPN/OPM), dan (i) tokoh-tokoh Papua yang ada di luar negeri.

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua," kata Presiden saat membuka rapat Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 9/11/2011.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dialog versi Papua. Pokok-Pokok Pikiran Neles Tebay (2011) dalam **Seminar dan Workshop Perumusan Model Dialog untuk Papua Damai** pada Forum Akademisi untuk Papua Damai dan IMPARSIAL, Bandung, o9 s/d 12 Desember 2011.

Mengacu pada format *noken* dialog di atas, beberapa suku atau subsuku di Papua telah berabad-abad lamanya menggunakan *noken* sebagai media dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Misalnya, Suku Maybrat di Provinsi Papua Barat menyelesaikan konflik dengan cara mengisi dan menyimpan kain timur sebagai harta benda utama dalam *noken* lalu menyerahkan pada pihak-pihak yang berkonflik atau pihak korban sebagai simbol perdamaian. Suku Mee, suku Moni, suku Amunge di Provinsi Papua menyelesaikan konflik dengan mengisi dan menyimpan kulit bia/kerang ke dalam *noken* sebagai alat tukar/pembayaran tradisional yang sah dalam membayar, membeli, dan menyelesaikan masalah berdasarkan sistem penyelesaian adatnya. Suku Asmat, Marind, Yakhai, dan sebagainya di Merauke Provinsi Papua menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi hasil kebun dalam *noken* sebagai simbol perdamaian pada tempat musyawarah-mufakat. Suku-suku di Teluk Cenderawasih (Biak, Serui, Waropen, dan Wandamen) menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi piring batu (porselin) ke dalam *noken* sebagai alat pembayaran, alat kontak, dan tanda ikatan untuk berbagai kepentingan.

### 4. Transformasi Ke-Indonesiaan

Dalam perspektif demokrasi Papua, tradisi *noken* melalui sistem politik *Big Man* di Papua telah berlangsung selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun silam, sedangkan sistem demokrasi liberal di Indonesia baru berlangsung selama 15 (lima belas) tahun belakangan ini sejak era reformasi. Dua sistem ini menjadi dua sisi yang berbeda dalam alam demokrasi. Tradisi *noken* dikonversi menjadi sistem demokrasi yang dianut, yakni *one man power all vote*, dan sebaliknya dalam tradisi sistem demokrasi liberal lebih mengedepankan asas "*one man one vote*". Tradisi *noken* dalam sistem demokrasi di Papua diberlakukan pada ekologi wilayah yang menganut sistem kepemimpinan *Big Man*, karena seorang *Big Man* atau kepala suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, akan tetapi juga sebagai pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaanya pun bukan hanya diperoleh dari keturunannya, tetapi karena pengaruh, kharisma, dan warna kepemimpinannya yang membuatnya disegani dan terkadang ditakuti.<sup>8</sup>

Dalam perspektif pemilihan umum (legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah), *noken* juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta wakilwakil lainnya dalam anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat untuk daerah pemilihan Papua. Proses pemilihan sistem *noken* dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat (kepala suku atau *Big Man*) setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada agar dimasukkan ke dalam *noken* sesuai dengan calon siapa yang diinginkan.9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peradaban sistem Politik Melanesia terbentang mulai dari Pulau Papua hingga ke Pulau Salomon yang memiliki karakterisitik sistem politik yang bertumpu pada "Big Man". Lihat Pieter Ell, dkk. (2013: x-xi). Sistem Noken, Demokratiskah?. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell dan Rekan-Pemda Prov.Papua.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Keputusan MK No.47-84/PHPU.A.VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengesahan Penggunaan Noken dalam Pemilu di Papua. Petunjuk Teknis No.1 Tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi Papua No. 030 Tahun 2013 dengan SK No.01/Kpts/KPU.Prov.030/2013.

Selain itu, semenjak era reformasi hingga ke era otonomi khusus Papua, tradisi noken telah mengalami tranformasi nilai ke arah tranformasi negosiasi. Noken kemudian dikemas menjadi media dialog damai sebagai wahana sentral dari seluruh proses penyelesaian konflik dengan dua pertimbangan dasar, yakni. Pertama, terjadinya dialog mencerminkan adanya kemauan baik (good will) dari setiap pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai atas pertikaian yang dihadapi. Negosiasi atau dialog menjadi indikator teramat penting bahwa para konfliktan melihat dan menyadari adanya caracara lain yang lebih bermartabat di luar cara-cara kekerasan (violent) dan bersenjata (armed) dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kedua, bagi sentralnya negosiasi adalah karena seluruh rangkaian perundingan tersebut diharapkan akan kesepakatan-kesepakatan (agreements) atau kesepahaman (mutual understandings) tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk (1) mengakhiri tindak dan cara kekerasan, (2) mengelola secara damai pertentangan dan perbedaan yang masih ada, dan (3) membangun dan membina hubungan damai secara berkelanjutan (sustainable peace) di antara para mantan aktor berkonflik.<sup>10</sup>

Dalam perspektif konflik Papua, tradisi *noken* digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik menurut Situmorang (2011) terdiri atas tiga tahapan, yakni (1) transformasi konteks, (2) transformasi isu, dan (3) transformasi para pihak. Ketiga bentuk tranformasi itu dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, transformasi konteks. Dalam hal ini, diperlukan perubahan yang mendasar atas iklim atau atmosfir yang menandai pola hubungan di antara para pihak yang bertikai, yakni mencakup aspek-aspek psikologis seperti rasa curiga (suspicious), tidak percaya (distrust), ketegangan (tension) dan permusuhan (enmity). Dari pihak pemerintah misalnya, masih kuat kecenderungan untuk memberikan cap (stigmatisasi) atas setiap bentuk protes, kritik, aksi demonstrasi, dan bahkan pertemuan/perkumpulan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat Papua. Sebaliknya, sejumlah kelompok masyarakat Papua memandang negatif dan curiga setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Niat baik pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dicurigai sebagai kebijakan melakukan kooptasi dan manipulasi atau bahkan okupasi. Operasi ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tentara sering pula dianggap sebagai tindakan intimidasi, pembungkaman, dan operasi. Atmosfir negatif semacam itu bukan tidak berdasar. Masing-masing pihak memiliki bukti yang cukup memadai untuk bersikap curiga dan bertindak seperti itu. Bukti-bukti semacam ini terutama didokumentasikan oleh kalangan media dan para aktivis NGOs. Salah satu langkah strategis untuk mentransformasi konteks atau atmosfir semacam itu adalah dengan cara mengurangi sebanyak mungkin tindak kekerasan baik dalam nama operasi ketertiban dan keamanan masyarakat maupun dalam nama menjaga kesatuan wilayah (NKRI). Desakan dan tekanan seperti ini lebih kuat ditujukan kepada pihak pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tawaran konsep Mangadar Situmorang (2011) Ke Arah Penyelesaian Konflik di Papua pada **Seminar dan Workshop Perumusan Model Dialog untuk Papua Damai** pada Forum Akademisi untuk Papua Damai dan IMPARSIAL, Bandung, 09 s/d 12 Desember 2011

karena kekuatan militernya yang sangat dominan (dalam konteks *asymmetric conflict*), *mobile*, dan *flexible*.

Kedua, *Transformasi isu*. Konflik di Papua adalah konflik multi-dimensi yang mencakup aspek historis, legal, sosial, kultural, ekonomi, lingkungan, politik dan militer (keamanan). Transformasi isu dalam pengertian mereduksi atau menggeser titik fokus hampir tidak mungkin, bahkan cenderung menyesatkan (*misleading*) dan berbahaya (*dangerous*). Transformasi isu mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu mengidentifikasi persoalan-persoalan konflik. Menurut Widjodjo, dkk., (2009) telah menegaskan adanya kesalingtautan dan tumpang tindih antara satu isu dengan isu lainnya. Identifikasi dan pengakuan atas persoalan-persoalan yang ada merupakan langkah penting untuk mencari solusi-solusi yang tepat. Semua persoalan di Papua terformulasikan dengan sangat baik dalam ungkapan *negotiating the past, improving the present*, dan *securing the future.*<sup>17</sup>

Ketiga, Transformasi pihak (yang bertikai). Seperti pada isu di atas, harus pula dilakukan identifikasi yang cermat tentang siapa atau apa yang menjadi pihak yang terlibat dalam persoalan di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pihak yang paling pertama dan utama yang berhasil diidentifikasi. Sekalipun dalam perkembangannya kelompok ini dinilai kecil, baik jumlah maupun kekuatannya, OPM merupakan kelompok yang berada di paling ujung garis ekstrim. Di ujung yang berlawanan adalah personel polisi dan militer atau mungkin juga politisi ultranasionalis. Penempatan keduanya pada ujung garis ekstrim tersebut adalah karena posisi politik yang mereka miliki serta cara perjuangan/perlawanan yang mereka tempuh.

### 6. Penutup

Noken bukanlah sekedar wacana semata lagi, karena telah menjadi warisan tradisi terbaik yang diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu kekayaan budaya tak benda 'Intangiable Cultural Heritage' sebagai bagian dari prioritas keselamatan warisan budaya tanpa mengorbankan unsur-unsur budaya lainnya. Noken dalam paradigma tradisi lisan mengambil peran di Papua sebagai salah satu media penyelesaian konflik melalui model "Noken Dialog". Sebagai bagian dari proses demokrasi, noken dipandang sebagai sebuah konstruksi kontekstual yang terkini dalam membangun prinsip-prinsip kesetaraan dan keberpihakan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Noken secara kreatif, inisiatif, dan imajinatif menjadi alat legitimasi baru rakyat Papua dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai sistem media demokrasi (noken demokrasi), noken juga dikonstuksikan sebagai media perdamaian dalam proses aktor yang berkonflik (noken dialog).

Sebagian besar warga negara berharap banyak dari demokrasi. Dengan noken demokrasi diharapkan terlahir keputusan-keputusan yang mampu menentukan kehidupan kolektif dengan mengacu pada pertimbangan keanekaragaman ruang-ruang publik demokrasi. Besar harapan warga negara bahwa noken demokrasi dapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muridan S. Widjojo, Andriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi, *Papua Road Map* (Jakarta: LIPI, 2009).

mengurangi ketidakadilan dan membuat konstruksi organisasi kehidupan kolektif menjadi lebih rasional. Di beberapa ekologi wilayah yang berpotensi konflik, nuansa konflik kepentingan menjadi dominasi dan nilai-nilai demokrasi tidak terletak dalam janji-janji keadilan, tetapi terletak pada kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik kepentingan secara damai dan bermartabat.

### Daftar Rujukan

- Ell, Pieter, dkk. 2013. Sistem Noken, Demokratiskah?. Jayapura: Kantor Advokad dan Konsultan Hukum-Pemerintah Provinsi Papua
- Flassy, Don. A.L. 2000. *Transformasi Jati Diri Bangsa Papua.* Port Numbay: KNPP Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan.* Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Pekei, Titus. 2011. *Cermin Noken Papua. Perspektif Kearifan Lokal Mata Budaya Papuani.*Nabire: Ecology Papua Institut (EPI)- KEMENPEREK
- Tebay, Neles. 2011. "Papua Butuh Pendekatan Hati". Kompas, 04 November, hal 7, kol.1.
- Tim JDP. 2011. Tawaran Konsep Dialog Jakarta-Papua. Jayapura: Jaringan Damai Papua
- Warami, Hugo. 2012 "Tradisi Dou Sandik: Cermin Identitas Guyub Tutur Biak Numfor-Papua"" dalam Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan VIII, Tanjung Pinang, 23-27 Mei 2012, hlm.48-49. Tanjung Pinang: Pemprov. Kepri - ATL Pusat.
- Warami, Hugo. 2014 "Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai" dalam Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan IX, Manado-Bitung, 21-24 September 2014. Manado: Pemkot. Bitung ATL Pusat.
- Widjojo, Muridan S., dkk. 2009. Papua Road Map. Jakarta: LIPI-Yayasan Tifa dan YOI.